

ISU STRATEGIS KESENJANGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Suzanna Josephine L. Tobing¹, Rutman L. Toruan¹, Emma Tampubolon¹, Anton Nomleni²

¹Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Universitas Matana, Serpong, Indonesia

E-mail: posmahutasoit@gmail.com

Abstract

This paper wants to see the problem of education in the East Nusa Tenggara Province. The research method used by examining some literature and using qualitative descriptions which are secondary data. The data obtained comes from the Regional Medium-Term Development Plan of the East Nusa Tenggara Province. The average education rating in NTT is the fourth lowest in Indonesia. Realizing this, the Regional Government has a mission to improve human resources, one of which is through education. Among other things by increasing investment in education, such as increasing the number of classrooms in upper secondary schools, and vocational and university / polytechnic schools. Various strategies and directives are planned by the NTT Regional Government for the purpose of increasing the Human Development Index (HDI or IPM).

Keywords: Human Resources, Education Gap, Indonesian Development Index, Education Program

Abstrak

Paper ini ingin melihat permasalahan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dengan menelaah beberapa literatur dan menggunakan deskripsi kualitatif yang merupakan data sekunder. Data yang didapat berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peringkat rata-rata pendidikan di NTT merupakan terendah keempat di Indonesia. Menyadari hal tersebut Pemerintah Daerah memiliki misi meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Diantaranya dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, dan sekolah kejuruan dan universitas/politeknik. Berbagai strategi dan arahan direncanakan oleh Pemerintah Daerah NTT untuk tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Kesenjangan Pendidikan, Indeks Pembangunan Indonesia, Program Pendidikan

PENDAHULUAN

Masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai wilayah yang sangat rendah tingkat pendidikan masyarakatnya, dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal ini harus disikapi karena kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi cara pikir dan inovasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan begitu perlu ditingkatkan program pendidikan di seluruh wilayah kabupaten khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang kadang belum terjamah sama sekali (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah di Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional terkini, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.(RPJMN, 2015-2016)

Kawasan perbatasan di Provinsi NTT didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Hambatan pengembangan potensi sumber daya alam kawasan perbatasan yang sering terjadi adalah isu rendahnya kualitas sumber daya manusia karena belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program terkait pelatihan dan

pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk meningkatkan keahlian/kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alam kawasan perbatasan masih sangat jarang. Isu kurangnya tenaga pendidik/pengajar di kawasan perbatasan darat menghambat pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan. (BNPP, 2015)

Provinsi NTT memiliki kawasan perbatasan antarnegara, yaitu wilayah kecamatan dan atau wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Seperti pada umumnya, kurangnya pengembangan optimal dan pemanfaatan fasilitas dasar atau infrastruktur di daerah perbatasan adalah masalah umum terjadi hampir dalam semua wilayah perbatasan Indonesia. Jika daerah perbatasan dibiarkan terbelakang dan terisolasi, aksesibilitas yang kurang, terutama akses kepada pelayanan public, pemerintah pusat, atau daerah maju lainnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang tidak merata karena karakteristik geografis daerah juga memberikan sumbangan yang besar. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali melebihi daya dukungnya, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi wilayah-wilayah perbatasan Indonesia (Kennedy, 2018).

Paper ini ingin melihat isu atau permasalahan daerah khususnya masalah pendidikan di wilayah Provinsi NTT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kuantitatif dengan sumber data merupakan data sekunder. Data yang didapat berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMBAHASAN

Profil Demografi NTT

Peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pada Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 5.120.061 jiwa meningkat menjadi 5.203.514 jiwa tahun 2016 atau meningkat 83.453 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk 5.287.302 dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/Km².

Kepadatan penduduk tertinggi Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/ Km², dan terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/Km². Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau 50,46 persen dengan sex ratio sebesar 98 persenyang berarti di setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan *sex ratio* dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan komposisinya per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.

Selama tiga tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT meningkat dari 62,67 pada tahun 2015 menjadi 63,13 pada tahun 2016 dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 63,73 sebagai akumulasi IPM Kabupaten/Kota seperti pada Tabel 3.

Pada tahun 2013-2017 capaian IPM Kabupaten/Kota berkisar antara 54–78 tahun. Kota Kupang memiliki nilai IPM tertinggi sementara nilai IPM terendah di Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2017 tercatat 16 Kabupaten/Kota berstatus “sedang” dan lima Kabupaten/Kota berstatus “rendah”. Hanya Kota Kupang yang memiliki status IPM “tinggi”. Pembangunan IPM merupakan hasil dari tiga indikator yang diukur yaitu :

1. Umur Harapan Hidup (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pada tahun 2010-2017 UHH meningkat 0,79 tahun dan secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. UHH tahun

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	1 20 6	2017
Laki-Laki (Jiwa)	2,455,068	2,495,917	2,536,872	2,577,953	2,619,181
Perempuan (Jiwa)	2,498,899	2,540,980	2,583,189	2,625,561	2,668,121
Jumlah Penduduk (Jiwa)	4,953,967	5,036,897	5,120,061	5,203,514	5,287,302
Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,70	1,67	1,65	1,63	1,61
Kepadatan Penduduk Jiwa /km ²	105	105	108	109	110
Sex Ratio	98	98	98	98	98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi NTT, Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk		Jumlah	Persen	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²
		Laki-laki	Perempuan			
Sumba Barat	737,42	64,918	60,858	125,776	2,38	171
Sumba Timur	7 005,00	129,389	123,315	252,704	4,78	36
Kupang	5 525,83	190,480	182,297	372,777	7,05	67
TTS	3 947,00	228,917	235,063	463,980	8,78	118
TTU	2 669,70	123,384	126,327	249,711	4,72	94
Belu	1 248,94	106,782	106,814	213,596	4,04	171
Alor	2 928,88	98,916	103,974	202,890	3,84	69
Lembata	1 266,39	64,581	73,133	137,714	2,60	109
Flores Timur	1 754,98	120,285	131,326	251,611	4,76	143
Sikka	1 731,91	150,023	167,269	317,292	6,00	183
Ende	2 068,00	128,819	143,265	272,084	5,15	132
Ngada	1 722,24	77,701	81,380	159,081	3,01	92
Manggarai	1 915,62	161,192	168,006	329,198	6,23	172
Rote Ndao	1 284,41	81,207	78,407	159,614	3,02	124
Manggarai Barat	3 141,47	130,199	133,008	263,207	4,98	84
Sumba Tengah	1 817,88	36,385	34,334	70,719	1,34	39
SBD	1 445,32	170,293	161,601	331,894	6,28	230
Maggarai Timur Sabu	2 502,24	138,380	141,738	280,118	5,30	112
Raijua Malaka	460,47	46,814	44,698	91,512	1,73	199
Kota Kupang	1 160,61	90,121	96,191	186,312	3,52	161
	180,27	211,104	201,604	412,708	7,81	2.289
Provinsi	47 931,54	2,619,181	2,668,121	5,287,302	100	110

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

2016 sebesar 66,04 tahun dan tahun 2017 mencapai 66,07 tahun, yang berarti bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun atau meningkat 0,03 tahun dari tahun sebelumnya.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) periode 2010-2017 meningkat sebesar 2,22 tahun dan secara rata-rata tumbuh sebesar 2,71 persen pertahun. Meningkat HLS menjadi hasil positif bahwa semakin banyak penduduk sekolah. Pada tahun 2017, Harapan Lama Sekolah mencapai 13,07 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal tumbuh sebesar 1,37 persen per tahun selama periode 2010-2017. Pada tahun 2017, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai lama sekolah 7,15 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I).

3. Standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012).

Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp. 7,35 juta per tahun. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 1,52 persen per tahun. Kondisi IPM Nusa Tenggara Timur seperti pada Tabel 2.9.

Selama periode tahun 2010-2017, IPM rata-rata tumbuh sebesar 1,06 per tahun dan pada periode 2016-2017 IPM tumbuh sebesar 0,95 persen. Kenaikan yang dicapai belum mampu mencapai rata-rata nasional dan saat ini berada pada peringkat 33 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di NTT masih perlu perhatian untuk terus ditingkatkan. Perbandingan IPM di NTT dan Nasional seperti ada Gambar 1 di bawah ini.

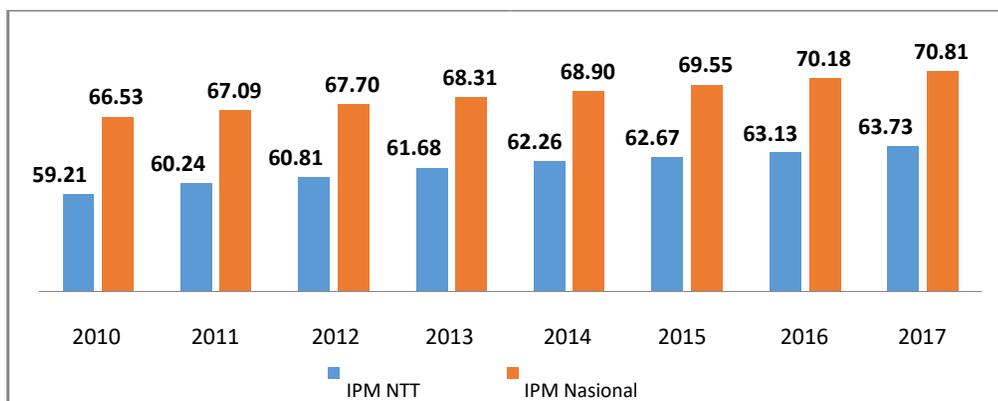
Profil Pendidikan di NTT

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengukur tingkat perkembangan pendidikan yang didasarkan pada aspek kesejahteraan masyarakat yaitu Angka

Tabel 3. IPM Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Peringkat
Sumba Barat	60,55	60,90	61,36	61,85	62,30	10
Sumba Timur	61,44	62,04	62,54	63,22	64,19	5
Kupang	61,07	61,68	62,04	62,39	62,79	9
Timor Tengah Selatan	58,76	59,41	59,90	60,37	61,06	16
Timor Tengah Utara	59,56	60,41	60,96	61,54	62,03	12
Belu	59,12	59,72	60,54	61,04	61,44	15
Alor	57,52	58,00	58,50	58,99	59,61	18
Lembata	60,56	61,45	62,16	62,81	63,09	6
Flores Timur	59,80	60,42	61,24	61,90	62,89	8
Sikka	60,84	61,36	61,81	62,42	63,08	7
Ende	64,64	65,25	65,54	65,74	66,11	3
Ngada	64,63	64,64	65,10	65,61	66,47	2
Manggarai	59,49	60,08	60,87	61,67	62,24	11
Rote Ndao	57,28	57,82	58,32	59,28	60,51	17
Manggarai Barat	59,02	59,64	60,04	60,63	61,65	13
Sumba Tengah	57,25	57,60	57,91	58,52	59,39	19
Sumba Barat Daya	59,26	59,90	60,53	61,31	61,46	14
Nagekeo	62,24	62,71	63,33	63,93	64,74	4
Manggarai Timur	55,74	56,58	56,83	57,50	58,51	21
Sabu Raijua	51,55	52,51	53,28	54,16	55,22	22
Malaka	56,14	56,94	57,51	58,29	58,90	20
Kota Kupang	77,24	77,58	77,95	78,14	78,25	1
IPM Provinsi NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73	33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia NTT dan Nasional Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Angka melek huruf di NTT secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017. Menurut data Susenas tahun 2017 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 91,68 persen atau masih terdapat 8,32 persen penduduk yang buta huruf.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi angka melek huruf berarti angka buta huruf akan semakin rendah. Capaian angka melek huruf Provinsi NTT tahun 2013-2017 rata-rata 91 persen dan capaian Nasional rata-rata mencapai 95 persen. Pada tahun 2017 angka melek huruf NTT mencapai 91,68 persen masih di bawah Nasional sebesar 95,92 persen. Namun demikian, capaian angka melek huruf tersebut

masih belum mencapai target SDG's, yakni 100 persen.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD/ sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP/ sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 adalah 7,62 tahun atau secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur hanya mencapai pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP/ sederajat. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari partisipasi sekolah penduduk atas setiap

jenjang pendidikan. Pencapaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama menunjukkan adanya pemerataan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi agaknya membutuhkan upaya bersama yang lebih berdampak bagi pencapaian pendidikan yang lebih merata. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi NTT mencapai 7.62 tahun dan Nasional tahun 2017 adalah 8,10 tahun atau masih setara dengan kelas VII. Diharapkan upaya bersama baik di Provinsi NTT maupun secara Nasional bagi anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan akan dapat bersekolah selama 12,39 tahun.

Penyerapan tenaga kerja menurut pendidikan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 1,34 juta orang atau 57,92 persen. Pekerja berpendidikan Tamat Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,13 juta orang atau 13,30 persen. Tenaga kerja berpendidikan SMA Kejuruan memberi kontribusi sebesar 5,00 persen, lebih rendah dibanding SMA Umum yang sebesar 13,77 persen. Demikian pula tenaga kerja berpendidikan diploma lebih rendah yaitu 2,25 persen dibanding berpendidikan universitas yang sebesar 7,76 persen.

Jumlah pengangguran menurut Tingkat pendidikan pada tahun 2017 dengan penganggur terdidik yang tertinggi adalah berpendidikan SMA umum sebesar 24.513 ribu atau 31,21 persen. Untuk yang berpendidikan S1/S2/S3 adalah sebesar 17.077 ribu atau 21,74 persen, diikuti dengan yang berpendidikan SD sebesar 19,08 persen. Jumlah pengangguran tahun 2017 sebanyak 78,5 ribu orang, dengan penganggur terdidik berpendidikan SMA keatas sebesar 71,86 persen. Bila dipilah menurut jenis kelamin, penganggur berpendidikan SMA ke atas lebih banyak didominasi perempuan, sedangkan berpendidikan SMP kebawah didominasi laki-laki. Bila kita pilah menurut daerah tempat tinggal, penganggur berpendidikan SMA keatas lebih banyak tinggal

di perkotaan, dan berpendidikan SMP ke bawah lebih banyak tinggal di perdesaan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, pembangunan pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Rasio Guru terhadap Murid.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur tertentu. Nilai APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Anak usia sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (98,27persen) dan 13-15 tahun (94,76persen) hampir seluruhnya telah bersekolah atau mengakses fasilitas pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Sementara pada kelompok Umur 16-18 tahun (74,65persen), akses fasilitas pendidikan relatif rendah. Secara rata-rata hanya 3 dan 4 penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah, sisanya memilih untuk tidak bersekolah. Tabel 5 menunjukkan kondisi partisipasi sekolah dasar dan menengah tahun 2017.

Tingginya partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun merupakan hasil program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun sebagai ketentuan wajib belajar setiap warga negara untuk bersekolah selama 12 tahun yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar atau yang sederajat hingga kelas 12 sekolah menengah atas atau yang sederajat. Ditinjau dari gender, secara umum, partisipasi sekolah antar perempuan dan laki-laki relatif tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, baik perempuan maupun laki-laki hampir semua telah mengakses pendidikan. Hampir pada semua kelompok usia sekolah, perempuan yang mengenyam pendidikan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki.

Tabel 4. APS Menurut Kelompok Umur (persen) Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>7 - 12</i>					
-Laki-laki - Perempuan	96,60 98,10	97,35 98,66	97,60 98,67	98,24 98,35	93,71 98,65
Total	97,34	97,99	98,13	98,12	98,27
<i>13 - 15</i>					
-Laki-laki - Perempuan	89,23 89,64	93,81 94,77	92,14 96,70	94,60 91,80	93,71 95,88
Total	89,43	94,26	94,39	97,50	94,76
<i>16 - 18</i>					
-Laki-laki - Perempuan	64,64 64,99	73,70 74,24	71,25 77,39	74,56 73,25	71,97 77,48
Total	64,81	73,96	74,25	75,94	74,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

APK merujuk tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan atau jenjang. APK yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan angka di atas 100 persen sepanjang periode 2013-2017. APK tertinggi pada jenjang pendidikan dasar 114,12 Persen pada tahun 2017, yang berarti selain siswa 7-12 tahun yang duduk dibangku SD, juga ada yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun duduk di tingkat pendidikan yang sama atau mengulang kelas. APK jenjang pendidikan menengah turun 91,35 persen, dan APK jenjang pendidikan menengah ke atas 78,83 persen.

Perbedaan penyerapan anak usia sekolah menengah dan tinggi oleh lembaga pendidikan ditengarai oleh berbagai faktor utamanya adalah biaya untuk pendidikan. Transportasi atau biaya hidup siswa yang jauh dari pusat pendidikan merupakan masalah utama dalam meningkatkan kepeserta. Upaya untuk menekan biaya pendidikan sekaligus menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas perlu terus ditingkatkan demi meratanya pendidikan menengah dan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Angka Partisipasi Murni adalah mengukur ketepatan usia penduduk dalam jenjang pendidikan tertentu. Pola yang ditunjukkan oleh

nilai APM tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan oleh nilai APK, yakni pada jenjang SD/ sederajat nilainya lebih tinggi, kemudian semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

APM pada jenjang SD/ sederajat sudah mencapai 95,40 persen pada tahun 2017, berarti hampir semua anak pada jenjang pendidikan dasar telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia yang dianjurkan. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, persentase anak yang bersekolah tepat usia sebesar 67,16 persen, sementara pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 53,32 persen.

Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu, maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan, yaitu jumlah sekolah, murid dan rasio tahun 2013-2017 seperti tabel 7.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian di Provinsi NTT adalah tingginya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah.

Tabel 5. APK Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	113,44	114,68	116,46	114,12	114,05
SMP/MTs	80,25	88,66	88,96	89,56	91,35
SMA/SMK/MA	64,85	71,86	75,54	79,34	78,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 6. APM Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) (persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	93,53	94,56	94,95	95,24	95,40
SMP/MTs	59,32	65,86	66,32	66,56	67,16
SMA/SMK/MA	47,30	52,15	52,51	52,87	53,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Ratio Murid-Guru
SD/MI	2013	4.910	867.045	24.892	34.83
	2014	4.977	817.680	25.872	31.60
	2015	5.116	840.208	54.827	15.32
	2016	5.171	823.742	53.447	15.41
	2017	5.226	800.926	50.685	15,80
SMP/MTs	2013	1.453	293.126	9.677	30,29
	2014	16.16	325.742	10.56	30,85
	2015	1.599	328.827	24.567	13,38
	2016	1.667	342.498	23.757	14,42
	2017	1.730	350.169	24.936	14,04
SMA/SMK/ MA	2013	623	202.081	25.205	8,02
	2014	864	221.371	21.585	10,26
	2015	748	223.436	17.509	12,76
	2016	792	253.361	18.452	13,73
	2017	825	267.469	20.169	13,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013-2017

Pendidikan Tertinggi	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak Punya Ijazah	36,47	34,43	27,86	33,30	26,57
SD Sederajat	31,07	32,05	32,08	35,77	31,16
SLTP Sederajat	13,02	12,92	15,54	9,06	16,41
SLTA Sederajat	14,98	15,29	17,25	15,56	18,36
Diploma	1,51	1,58	2,08	1,36	1,87
Sarjana	2,95	3,71	5,18	4,94	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Pada tahun 2017 bahwa sekitar 26-27 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Kelompok penduduk ini sudah dapat dipastikan tidak dapat terserap pada pasar tenaga kerja yang menuntut adanya capaian tingkat pendidikan tertentu. Pendidikan informal dan non formal perlu digalakkan dalam menjaring 26 persen penduduk usia 15 tahun ke atas. Kondisi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa hanya 11

persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan tinggi dan sebagian besar penduduk merupakan lulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Apabila dipilah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah, sebagian besar anak usia sekolah memilih untuk berhenti pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

Berdasarkan kondisi pendidikan menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak usia 16-18 tahun di NTT memilih untuk berhenti sekolah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pendidikan di NTT

Pendidikan adalah salah satu bidang pembangunan yang sangat mendasar karena terkait dengan penyiapan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang pendidikan. Selain itu pengembangan pendidikan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. (Firkan Maulana, 2010)

Provinsi NTT memiliki visi “Bangkit Mewujudkan masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan salah satu misinya adalah “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Permasalahan dalam pencapaian misi sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan peningkatan kompetensi masih tinggi. Pendidikan adalah salah satu input penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karenanya pembangunan pendidikan ditujukan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penduduk. Pembangunan di bidang pendidikan selain untuk dapat menggerakkan roda pembangunan, juga merupakan investasi bagi kemajuan suatu bangsa.

Berdasarkan indikator pembangunan pendidikan, menunjukkan permasalahan masih rendahnya penyerapan penduduk pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Permasalahan pendidikan lainnya adalah masih rendahnya angka melek huruf, masih rendahnya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masih tingginya angka putus sekolah, rendahnya

kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Berbagai kondisi di NTT memberikan permasalahan dalam mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia yaitu:

- Rendahnya kualitas dan akses pendidikan disebabkan: rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendahnya kualitas pengelolaan sistem pendidikan, terbatasnya biaya pendidikan;
- Rendahnya kualitas dan akses kesehatan disebabkan: rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga medis dan paramedis dan belum berkembangnya sistem pelayanan untuk seluruh masyarakat miskin termasuk penyandang disabilitas;
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan belum optimalnya pembangunan olahraga berprestasi;
- Rendahnya kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, industri, jasa-jasa dan lapangan usaha lainnya.

Dengan demikian persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di NTT perlu ditangani dengan baik, diantaranya adalah:

- Sarana dan prasarana, yaitu: Kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar mengajar sehingga peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi.

- Tenaga pendidik, yaitu: Kekurangan guru yang berkualitas untuk tiap mata pelajaran; Kualitas guru belum memadai
- Peserta didik, yaitu: Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dalam membiayai pendidikan anak-anaknya sangat rendah karena penghasilan yang didapat juga rendah. Sedangkan di sisi lain, pendidikan memerlukan biaya yang besar dan kontinu setiap waktunya, Akibatnya anak-anak usia sekolah sering lebih diberdayakan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaannya untuk menghasilkan uang agar perekonomian keluarga terbantu; dan Kemampuan dan keterampilan siswa masih jauh dari yang diharapkan. Karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik yang kurang menyebabkan adanya kesenjangan kemampuan dan keterampilan
- Manajemen sekolah, yaitu: Pengelolaan sekolah masih belum optimal; dan Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam
- mengelola sekolah
- Peran serta masyarakat, yaitu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk meningkatkan kinerja sekolah

Perlu perhatian pada perbaikan isu strategis yang mempengaruhinya yaitu: pemerataan aksesibilitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat dan peningkatan kompetensi sumber daya melalui pelatihan, melalui kemitraan lembaga pelatihan/institusi dalam dan luar Negeri. Tujuan yang harus dicapai adalah: Meningkatkan IPM; Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat NTT; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT; Meningkatkan kualitas Pemuda dan angkatan kerja NTT; dan Meningkatkan produktivitas daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan, karena itu perlu:

- Memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah tertinggal dan perbatasan;
- Meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang matematika, sains dan literasi;
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia;
- Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas,
- Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
- Adanya jaminan kesehatan

Berbagai strategi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;
- Mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan;
- Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja.

Dengan arah kebijakan untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia yang dapat dilakukan, yaitu:

- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
- Meningkatnya kualitas pendidikan;
- Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja berketerampilan dalam berbagai bidang pekerjaan terutama dalam bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan dan industri pariwisata;
- Pengadaan data dan pengolahan informasi strategis terkait berbagai potensi dan

permasalahan pembangunan di NTT melalui base-line survey (BLS), survei rantai nilai, dan penelitian komoditas/produk/jenis usaha unggulan (KPJU), untuk keperluan perencanaan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran;

- Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat;
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Pembangunan sumber daya manusia secara utama ditujukan untuk mendukung pencapaian IPM. Sumber daya manusia merupakan modal strategis dalam pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing dan percepatan pembangunan. Perlu dilakukan program lintas sektor, seperti program kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, program peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, program peningkatan kualitas pendidikan dan kelestarian budaya, program pembinaan perpustakaan dan kearsipan, program pembinaan tenaga kerja, koperasi dan UKM, serta program upaya kesehatan perorangan.

Pertumbuhan jasa pendidikan di Nusa Tenggara Timur saat ini telah meningkat, seiring investasi di bidang pendidikan oleh pemerintah yang banyak dilakukan pada tahun 2016 seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik serta pembangunan pusat kursus telah selesai dikerjakan pada Desember 2016 dan mulai dipergunakan pada tahun 2017. Selain itu, ditambah pula dengan adanya penambahan jumlah ruang kelas dan laboratorium di universitas/politeknik pada tahun 2017. Sektor-sektor utama yang mengalami akselerasi adalah administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Namun peringkat rata-rata pendidikan di NTT

terendah keempat di Indonesia.(Kementerian PPN/Bappenas, 2017)

KESIMPULAN

Gambaran kondisi pendidikan di NTT dapat dilihat dari indikator-indikator pendidikan sebagai berikut: Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD 98,27 %, SMP 94,76% dan SMA 74, 65%. Untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan/jenjang atau ukuran daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), APK SD sederajat tahun 2017 adalah sebesar 114,05%, SLTP sederajat 91,35 dan SLTA sederajat 78,83%. Selain indikator APS dan APK, indikator pendidikan lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator APM untuk mengukur ketepatan dalam jenjang pendidikan tertentu. APM SD sederajat tahun 2017 sudah mencapai 95,40%, SLTP sederajat 67,16% dan SLTA sederajat 53,32%.

Dalam pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan NTT, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mejadi prioritas utama yaitu: efektivitas proses belajar mengajar yang pada kenyataannya sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana belajar, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, metode pengajaran serta manajemen pendidikan; peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan, berkat dana Hibah Penelitian Simlibtamas yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III.. Peneliti juga mengucapkan terima kasih LPPM-UKI, dan semua pihak yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

BNPP, 2015, *Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015* Tentang Rencana Induk

- Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Jakarta.
- BPS Provinsi NTT, 2018, *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*, <https://ntt.bps.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas, 2017, *PrADa Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017*, Jakarta: Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, pp.1-40.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Heatubun A.B., Toruan R.L, 2018, "Strategic Issues of Indonesian Border Area Development based on The Master Plan 2015-2019", *Proceeding International Seminar on Accounting for Society*, Faculty of Economy Universitas Pamulang, pp.190198.
- Maulana F, 2010, *Input Paper RPJMN II 2010-2014 Pengembangan Kawasan Perbatasan*, Decentralization Support Facility, Jakarta.
- Pemprov NTT, 2018. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang.
- Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019* Republik Indonesia, Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Jakarta.